



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep.19-DPRD/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Jo. Pasal 152 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati selanjutnya dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk disampaikan pada rapat paripurna dan ditetapkan sebagai program pembentukan peraturan daerah dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa rapat pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah melalui koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah berakhir;
 - c. bahwa hasil rapat tersebut telah dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rapat Badan Musyawarah beserta catatan-catatannya, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3/2439/Bag. Hkm/2023 Perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun Anggaran 2024, tanggal 1 November 2023;
 2. Risalah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 31 Oktober 2023 serta tanggal 21 sampai dengan 24 dan 28 November 2023;
 4. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 29 November 2023;
 5. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 November 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



RISMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.4/Kep.19-DPRD/2023
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN BARU

NO.	JUDUL
A. USULAN PEMERINTAH DAERAH	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2044
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
B. USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Pra Sejahtera
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Wakaf
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUNCURAN DARI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBELUMNYA

NO.	JUDUL
A. USULAN PEMERINTAH DAERAH	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2043
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
B. USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Konservasi Tanah dan Air
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MASUK DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

NO.	JUDUL
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



RISMANTO